



PROSIDING KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Tahun 2016 Indonesia Menuju SDGs

Madani Hotel-Medan, 28-29 Februari 2016

Tim Editor :

Dr. Agussani, M.AP

Dr. Azamris Chanra, M.AP

Rudianto, S.Sos, M.Si

Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom

Ribut Priadi, S.Sos, M.I.Kom

Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

Siti Hajar, S.Sos, MSP

Keynote Speaker :

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bekerjasama dengan :



**PROSIDING KONFERENSI NASIONAL
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016:
Indonesia Menuju SDGs**

Tim Editor:

Dr. Agussani, M.AP
Dr. Azamris Chanra, M.AP
Rudianto, S.Sos.,M.Si
Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom
RIBUT Pribadi, S.Sos., M.I.Kom.
Arifin Saleh, S.Sos., MSP
Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd
Siti Hajar, S.Sos., MSP

**PROSIDING KONFERENSI NASIONAL
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016:
Indonesia Menuju SDGs**

Editor:

Dr. Agussani, M.AP., Dr. Azamris Chanra, M.AP., Rudianto, S.Sos., M.Si.,
Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom., Ribut Pribadi, S.Sos., M.I.Kom.,
Arifin Saleh, S.Sos., MSP., Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd., Siti Hajar, S.Sos., MSP.

Desain Sampul: Waroeng Potret art design, Publishing & Printing

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

All right reserved

Cetakan Pertama: Pebruari 2016

Diterbitkan oleh UMSU PRESS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238
Telp. 061-6638296, Fax. 061-6638296
Email: umsupress@gmail.com
<http://umsupress.com>

ISBN: 978-602-6997-104



PELAYANAN POLRI DALAM PERAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN KEJAHATAN DI KELURAHAN BENDUNGAN HILIR JAKARTA PUSAT	302
Evi Satispi	
MEMBANGUN SEMANGAT JIWA KEWIRAUSAHAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.....	323
Syaiful Bahri	
PERUBAHAN MANAJEMEN KEUANGAN: IMPLIKASI RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI BPKAD PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	329
Diana Hertati	
PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEGIATAN ADMINISTRATIF PUBLIK DI ERA DESENTRALISASI DEMOKRATIS: Kemauan Birokrasi Memparticipasikan Warga Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	346
Ulber Silalahi	
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS <i>COMMUNITY SURVEILANS</i>	369
Susi Hardjati	
PENGUATAN <i>QUALITY ASSURANCE</i> DI PERGURUAN TINGGI SEBAGAI SOLUSI AMPUH MENGHADAPI PERSAINGAN TENAGA KERJA PADA SAAT MEA.....	386
Dedi Amrizal	
SEGI-SEGI PERBUATAN ADMINISTRASI YANG MELAWAN HUKUM DALAM PELAYANAN PUBLIK	408
Ibnu Sina Chandranegara dan Evi Satispi	
INTEGRASI INDONESIA DI TENGAH KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI, GLOBALISASI, DAN DEMOKRATISASI: MEMBANGUN INDONESIA MELALUI POLITIK IDENTITAS.....	429
Meita Istianda	
DESENTRALISASI KEKUASAAN: PILKADA LANGSUNG PENGGERAK PARTISIPASI POLITIK	440
Syafhendry	
ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK (Studi Pada Ormas Alwasliyah Dan FORSU Pada Pilkada Kabupaten Batu Bara 2013)	455
Ananda Mahardika	

INTEGRASI INDONESIA DI TENGAH KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI, GLOBALISASI, DAN DEMOKRATISASI: MEMBANGUN INDONESIA MELALUI POLITIK IDENTITAS

Meita Istianda
Universitas Terbuka
Email: meita_istianda@yahoo.com

ABSTRAK

Sejak Reformasi bergulir tahun 1998 Indonesia menghadapi tantangan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang meningkat tajam pasca Reformasi, misalnya konflik dan kekerasan atas nama agama, kepentingan etnis dan kelompok. Ancaman terhadap integrasi nasional sebenarnya bukanlah milik generasi jaman sekarang, tetapi sudah ada sejak awal mula negara ini didirikan. Karena pada hakikatnya berdirinya negara Indonesia berpijak pada keberagaman yang tinggi baik dari segi etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi. Ancaman terhadap integrasi nasional pun saat ini semakin meluas akibat kemajuan di bidang Teknologi dan Informasi (TI), terjadinya globalisasi, dan gerakan demokratisasi. Kemajuan di bidang TI selain memberikan nilai-nilai positif dari segi penambahan wawasan pengetahuan, juga berdampak negatif. Ia memiliki potensi yang kuat sebagai elemen penggerak dalam mempengaruhi dan mengubah paradigma berpikir masyarakat. Demikian juga dengan globalisasi yang telah menjadikan dunia seakan tanpa batas. Ekspansi ekonomi, politik, maupun sosial budaya mendapatkan jalurnya melalui globalisasi. Suatu negara dapat mengekspansi negara lain, tanpa memerlukan kehadiran fisik sebagaimana di zaman sebelum abad ke-20 seperti yang dilakukan oleh negara-negara Kolonial. Di samping kemajuan di bidang TI dan fenomena globalisasi, yang tak kalah penting adalah gerakan demokratisasi. Gerakan ini telah menempatkan kekuatan masyarakat sebagai kelompok yang mempunyai hak menuntut jaminan bagi hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, dan tuntutan mendapat keadilan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ketiga jenis ancaman integrasi nasional yang berdiri di atas keberagaman dapat merapuhkan bangsa ini. Makalah ini hendak membahas masa depan integrasi nasional Indonesia di tengah kemajuan teknologi, globalisasi dan demokratisasi yang berpotensi mengaburkan identitas nasional. Upaya apakah yang dapat memperkuat identitas nasional Indonesia.

Kata kunci: integrasi, identitas nasional

PENDAHULUAN

Sejak Reformasi bergulir tahun 1998, hal yang tidak juga surut, tetapi semakin mengemuka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Hal ini terjadi karena berdirinya negara Indonesia tidak hanya berpijak pada berbagai macam suku bangsa. Namun mengacu pada pendapat Drake (1985), integrasi Indonesia terjadi karena proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, yang menjadi satu bangsa terutama karena pengalaman sejarah yang relative sama. Oleh karenanya, integrasi tersebut sesungguhnya rapuh.

Proses integasi Indonesia yang didasarkan pada begitu banyak perbedaan, dewasa ini menghadapi ancaman yang luar biasa terkait kemajuan di bidang Teknologi dan Informasi (TI), globalisasi, dan gerakan demokrasi. Kemajuan di bidang TI memiliki potensi yang kuat sebagai elemen penggerak dalam mempengaruhi dan mengubah paradigma berpikir masyarakat. Penggunaan media sosial seperti facebook, twitter, atau lainnya dapat memobilisasi masyarakat untuk melakukan revolusi di Mesir misalnya, atau pun saling serang antarpendukung kandidat Presiden dalam pemilu presiden baru-baru ini (Drake, 1985). Di sisi lain, globalisasi mampu menjadikan dunia tanpa batas. Suatu negara dapat mengekspansi negara lain, tanpa memerlukan kehadiran fisik sebagaimana sebelum abad ke-20 seperti yang dilakukan oleh negara-negara Kolonial. Kita masih ingat efek domino dari krisis moneter di tahun 1998, yang salah satunya akibat aksi spekulasi yang dilakukan oleh George Soros. Aksi George Soros bukanlah dalam bentuk intervensi secara fisik, tetapi melalui sistem spekulasi di bursa saham yang bekerja secara on-line. Namun, efek yang ditimbulkan mampu mengguncang dunia. Sejumlah negara mengalami *collapse* dalam waktu yang hampir bersamaan, yang mempengaruhi stabilitas politik negara tersebut.

Di samping kemajuan di bidang TI dan fenomena globalisasi, yang tak kalah penting adalah gerakan demokrasi. Gerakan demokrasi di abad ke-21 telah menjadi gerakan yang kecepatannya tidak dapat dibendung lagi. Sehingga

melahirkan apa yang dinamakan Huntington, tentang *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, yaitu ketika terjadi transisi dari rezim-rezim yang non-demokratis ke rezim-rezim demokratis yang terjadi pada kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi yang menuju arah sebaliknya (Huntington, 1991). Markoff (Markoff, 1996) mengatakan perubahan-perubahan besar yang terjadi dengan menguatnya globalisasi dan kapitalisme membawa pergeseran penting bagi gelombang “demokratisasi” di seluruh dunia. Linz dan Stephen (19..) menegaskan bahwa demokrasi adalah *the only game in town*, demokrasi menjadi agenda baru bagi setiap negara berkembang, hari ini dan di masa depan.

Terkait persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengembangkan *state* dan *nation buildings* Indonesia, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara majemuk, yang tantangannya semakin kompleks karena tekanan globalisasi dan demokratisasi. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan multi-identitas dan multi-loyalitas, yang tentunya berpotensi mengaburkan identitas nasional. Sehingga upaya memelihara integrasi mutlak dilakukan melalui politik identitas nasional.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Identitas

Politik identitas memiliki keterhubungan dan berakar dari fondasi filsafat komunitarianisme yang mempercayai bahwa setiap orang memiliki akar-akar sosial berupa tradisi, budaya dan nilai-nilai esensial yang bersifat partikular yang mendeterminasi pandangan hidup, fikiran dan pilihan-pilihan tindakan yang akan ia ambil (Pribadi, 2010). Berpijak pada pandangan tersebut, maka politik identitas mempercayai bahwa sebagai konsekuensi logis dari akar sosial dan kultural yang membentuk identitas diri dari setiap orang, maka setiap orang akan memiliki keterikatan dan loyalitas yang kuat pada satu ikatan politik identitas tertentu.

Terkait dengan itu identitas nasional perlu dibangun. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan

pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi, Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang-undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Sehingga apabila kita merujuk pada pendapat David Campbell (1995), identitas tidak bersifat baku, permanen dan tetap; melainkan relatif, dan mengalir. Proses pencarian identitas tidak pernah mencapai akhir, tetapi bersifat kontinuitas. Dalam hal ini, Campbell menguraikan bahwa setiap orang, entah itu secara individual atau kolektif, tidak bisa lepas dari proses tersebut.

Pendekatan-pendekatan post-modernisme sekarang ini melihat masalah identitas sebagai sebuah konstruksi sosial. Maksudnya, identitas bisa dikonstruksi, dihancurkan, dan dikonstruksi kembali. Proses rekonstruksi tersebut dapat dilakukan oleh negara sebagai pemilik otoritas. Negara merekonstruksi identitas bangsa melalui berbagai cara; pendidikan, media massa, institusi pendidikan atau keagamaan, dan mekanisme lainnya. Identitas seseorang meng-konstruksi-kan suatu proses dialogis yang menandai batasan-batasan apa saja mengenai diri-nya dan apa saja yang membuatnya sama atau berbeda dengan orang lain (Hall, 1992).

Jadi, mengacu pada Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari 'sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas'. Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang 'memiliki atau berbagi kesamaan' dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan keberbedaan atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda. Oleh karena itu, menurut Butler konstruksi mengenai identitas melibatkan seluruh peluang-peluang dari berbagai kategori pembedaan kolektif yang saling berkompetisi dan karena itu, kategori-kategori identitas tidaklah bersifat deskriptif, melainkan bersifat normative (Buttler, 1992).

Pengenaan identitas kolektif sebagai sumberdaya sekaligus sarana politik di dalam realitas modern, secara sederhana kita temukan di dalam fenomena terbentuknya “negara-bangsa” (*nation-state*) dalam era post colonial, dimana beragam latar belakang komunitas ras, suku-bangsa (etnis), agama membentuk komunitas negara-bangsa. Konsepsi semacam inilah yang dikembangkan oleh Anderson (1991) melalui tesis-nya mengenai “*imagined communities*” atau komunitas imajiner, dimana ikatan-ikatan kolektif dalam suatu komunitas politik bukan hanya suatu konstruksi politik semata, melainkan juga sebagai konstruksi budaya. Disini, ikatan terhadap kolektivitas bukan lagi didasari oleh kontak-kontak langsung secara fisik sebagaimana yang membuat kita terikat dengan komunitas di lingkungan atau di dalam suatu organisasi. Melainkan “diciptakan” oleh makna yang diproduksi melalui simbol-simbol dan praktek-praktek budaya yang saling dibagi bersama. Seperti penulisan sejarah, lagu-lagu kebangsaan, bendera, atau pengakuan bagi hari-hari besar nasional.

Klaim terhadap identitas merupakan kategori-kategori pembedaan kolektivitas yang peluang-peluangnya dapat kita temukan di dalam struktur kelas, gender dan seksualitas, orientasi budaya, atau bahkan dalam gaya hidup (bentuk-bentuk konsumsi). Perkembangan di dalam dunia kontemporer saat ini menunjukkan bahwasanya identitas politik sangatlah beragam dan klaim-klaim terhadap identitas “*bukan*” lagi menjadi monopoli bagi rezim kolektif tradisional (seperti ikatan paternalistik dalam relasi etnisitas, agama, struktur kelas sosial) atau bahkan negara. Tetapi juga menjadi wilayah bagi muncul-nya rezim-rezim “klaim-klaim kolektivitas baru” lintas kelas, ras, etnis, atau agama, misalnya, kelompok homoseksual. Klaim kolektivitas bahkan dapat diciptakan melalui diskursus politik-kebudayaan, misalnya pembedaan kelompok-kelompok liberal-fundamentalis, dan sebagainya.

Kaitan antara signifikansi identitas sebagai sumberdaya dan sarana yang memobilisasi “perbedaan” oleh Stuart Hall (1992) dirumuskan melalui pertanyaan sederhana: “Siapa saja yang membutuhkan identitas? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?”. Rosalind Brunt (1989) mendeskripsikan politik identitas sebagai: “...politik sekelompok orang yang berangkat dari penekanan terhadap

pengakuan (dalam derajat tertentu) terhadap aktivitas politik dan upaya yang melibatkan suatu proses terus-menerus untuk menandai siapa diri kita dalam relasi kita dengan orang lain”.

Seperti diutarakan oleh Sen (2006) bahwa tradisi maupun atribut identitas seseorang memang memberikan konteks kehadiran tiap-tiap orang dalam arena sosial, namun demikian kapasitas agensi dari tiap-tiap orang tidak dibatasi oleh pagar identitas yang melatarinya. Setiap orang sebagai agen sosial memiliki kapasitas nalar yang merdeka untuk memilih pilihan-pilihannya secara rasional dan menulis sejarah mereka sendiri. Hanya dengan berbasis pada kesadaran bahwa tiap-tiap orang memiliki kemampuan untuk mengambil sikap dan menjaga jarak dari akar-akar tradisinya, tindakan konstruktif yang bermakna bagi perubahan progresif dapat dilakukan. Politik identitas mempercayai bahwa atribut identitas dan kultur berperan sebagai perekat dari kolektivitas kelompok dari setiap orang yang menjadi anggota di dalamnya.

B. Indonesia: Politik Identitas

Berkaitan dengan permasalahan di atas, bagaimanakah identitas keindonesiaan kita saat ini? Sebagaimana konsepsi Campbell, identitas tidak bersifat baku, permanen dan tetap; melainkan relatif, dan mengalir. Proses pencarian identitas tidak pernah mencapai akhir, tetapi bersifat kontinuitas. Setiap orang, entah itu secara individual atau kolektif, tidak bisa lepas dari proses tersebut. Identitas nasional menyangkut sense, karenanya tidak dapat dilepaskan dari sense kesadaran terhadap ikatan kolektivitas, demikian dikatakan Stuart Hall. Dengan demikian meminjam konsep Champbell dan Hall, kita dapat menerangkan bahwa identitas ke-Indonesiaan selalu berproses. Proses tersebut tentunya mengikuti sense yang ada. Dengan melihat dan merasakan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini melalui berbagai peristiwa, seperti maraknya tuntutan untuk mendapat keadilan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, meningkatnya ego sektoral, etnis, agama, yang dikemukakan dengan cara-cara destruktif, maka proses identitas Indonesia berada di jurang perpecahan, rentan lepas dari ikatan kolektivitas nasional. Padahal bila menengok kepada sejarah pada saat awal

Negara ini diperjuangkan, kita menemukan betapa ide-ide dan program-program nasionalisme pada waktu itu menunjukkan betapa kuatnya kesadaran nasional dan identitas nasional. Konstruksi identitas pada saat itu begitu nyata yaitu nation building. Sayangnya, konsentrasi pemerintah di masa Orde Baru lebih mengutamakan pembangunan ekonomi. Dengan harapan, apabila terjadi stabilitas di bidang ekonomi akan memuluskan dan menstabilkan program-program pembangunan lainnya. Namun mereka lupa pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang yang belum stabil sistem politiknya acapkali menemui kegagalan. Sebagaimana dikatakan Huntington (1986), pertumbuhan ekonomi yang cepat malah menyebabkan ketidakstabilan politik.

Terkait dengan sistem demokrasi, demokrasi yang tumbuh di Indonesia memang telah menumbuhkan kesadaran sosial dan politik. Namun, kesadaran ini diekspresikan melalui aspirasi dan tuntutan secara berlebihan sehingga justru menimbulkan gejolak-gejolak sosial. Kasus-kasus yang belakangan ini terjadi di Indonesia misalnya, meningkatnya konflik horizontal dan vertikal merupakan dampak dari kesadaran demokrasi. Jika keadaan ini dibiarkan berlangsung lama akan menimbulkan anomie. Keadaan anomie ini menurut Samuel P. Huntington sangat berbahaya apabila terjadi pada negara-negara berkembang. Apabila Huntington lebih melihat kepada dampak yang ditimbulkan akibat proses demokratisasi, maka analisa klasik dari Rupert Emerson lebih berfokus pada kendala pembangunan politik dari sisi nasionalisme pasca kolonial. Emerson (1960) menyimpulkan bahwa nasionalisme muncul dari “gejolak dan perubahan sosial yang mendalam sifatnya, yang membongkar tatanan lama dalam masyarakat dan yang mempercepat proses mobilisasi sosial dan demokratisasi”. Seperti ditegaskannya, nasionalisme massal di negara-negara yang sedang berkembang merupakan pedang bermata dua: bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan berbagai kelompok dan kepentingan sosial demi tujuan bersama membentuk kerangka politik yang handal bagi tindakan bersama, tetapi juga bisa memecah belah bila suatu kelompok digerakkan dengan mengorbankan kelompok lain.

Sekali lagi, identitas nasional tergantung pada sense dan selalu berproses. Oleh karena itu apabila 'sense' yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini, pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, tidak dapat bersikap adil maka yang dirasakan adalah kekecewaan. Stuart Hall merumuskan melalui pertanyaan sederhana: "*Siapa saja yang membutuhkan identitas? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?*". Jadi, bila masyarakat (bangsa) yang tadinya dipersatukan secara politik merasa dirugikan dengan proses penyatuan tersebut, tentunya dapat berbalik arah menjadi tidak mendukung integrasi nasional, kemudian mencari saluran lain yang biasanya berwujud keinginan kembali kepada identitas asal (primordial) yang dianggap lebih komunitarian. Dan kenyataan ini didukung oleh realita bahwa proses integrasi bangsa-bangsa yang tergabung dalam NKRI, berasal dari bangsa-bangsa yang tadinya memiliki kedaulatan sendiri (Istianda, 2011).

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka peran politik identitas tidak dapat diabaikan lagi. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa identitas bisa dikonstruksi, dihancurkan, dan dikonstruksi kembali. Oleh karena itu, apabila pemerintah merasakan bahwa pada saat ini terjadi masalah yang krusial terkait dengan identitas dan integrasi nasional yang cenderung mengarah kepada disintegrasi, seyogyanyalah pemerintah berupaya mengonstruksi kembali ke arah kohesifitas.

Proses rekonstruksi tersebut dapat dilakukan oleh negara sebagai pemilik otoritas. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dapat menggunakan cara seperti misalnya melalui institusi pendidikan dengan kurikulum sejarahnya. Sebagaimana dinyatakan Adam (2007), identitas nasional bisa diperoleh melalui rekonstruksi sejarah nasional yang mengungkapkan pengalaman bersama di masa lalu. Masa lalu bersama itu yang merupakan identitas nasional. Selain melalui sejarah, identitas nasional suatu negara juga bisa dicari lewat pemahaman budaya (Goff, 2000). Misalnya membangun industri budaya yang memperlihatkan karakteristik dan ide mengenai suatu negara melalui industri film, siaran radio dan televisi, buku, dan lainnya. *Culture industries* berperan penting dalam membangun komunitas politik lewat *shared images, ideas, and definitions* yang akan

menegaskan kembali mengenai identitas nasional mereka agar loyalitas kepada negara terbangun. Selain kedua contoh di atas, masih banyak cara lain yang dapat dilakukan negara untuk merekonstruksi identitas nasional, misalnya melalui peran partai politik, birokrasi atau pun militer. Namun dari kesemua itu, yang terpenting adalah apakah pemerintah Indonesia menyadari di titik manakah sebenarnya sense keindonesiaan kita saat ini? Pertanyaan tersebut patut direnungkan, di tengah maraknya konflik berbasis etnis, agama, atau pun kelompok.

Weiner dalam Muhaimin dan Collin MacAndrews (1988), ada dua strategi kebijakan yang dapat dilakukang oleh pemerintah untuk mencapai integrasi nasional: (1) penghapusan sifat-sifat kultural utama dan komunitas-komunitas minoritas yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Biasanya, yang berpengaruh ialah kebudayaan dari kelompok budaya yang dominan maka kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan jalan proses asimilasi, (2) penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaa-kebudayaan kecil, yaitu kebijaksanaan ‘bhineka tunggal ika’ di mana secara politis merupakan ‘penyatuan etnis’ dari seluruh suku bangsa.

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Dengan karakteristik tersebut, secara alamiah Indonesia akan selalu berhadapan dengan konflik. Kesulitan dan masalah akan bertambah jika negara gagal mewakili dan memenuhi kepentingan masyarakat yang majemuk tersebut, seperti terlihat dalam beberapa kasus belakangan ini di mana negara tidak hadir dalam berbagai masalah sosial dan konflik kekerasan di akar rumput.

Integrasi nasional Indonesia oleh karenanya terkait dengan kemampuan negara untuk memenuhi kepentingan masyarakat, *state-building* dan *nation-building*, serta masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Saat ini, agenda nasionalisme dan identitas nasional Indonesia sudah kabur dan bahkan hilang dari wacana politik pembangunan nasional. Masalah identitas tidak lagi dianggap sebagai isu penting yang perlu didiskusikan pada saat ini. Padahal, identitas nasional adalah sebuah proses yang terus menerus bergulir dan bersifat

relatif. Oleh karena itu perlu terus menerus dijaga dan diperjuangkan. Apabila etnisitas, agama, atau elemen primordial lain muncul di pentas politik sebagai prinsip paling dominan dalam pengaturan negara dan bangsa, atau terkandung maksud merubah sistem yang selama ini berlaku, bukan tidak mungkin ancaman disintegrasi bangsa dalam arti yang sebenarnya akan terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Wardam. (2007). *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Jakarta.
- Warasi, Esmi. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama
- Brunt, Rosalind. (1989). "The Politics of Identity", in Hall, S. and Jacques, M. (eds), *New Times: The Changing Face of Politics in the 1990s*. London: Lawrence and Wishart.
- Campbell, David. (1998). *Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity*. Revised Edition. Manchester: Manchester University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Duverger, Maurice. (1981). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Drake, Christine. (1985). *National Integration in Indonesia, Pattern and Policy*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Emerson, Rupert. (1960). *From Empire to Nation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hall, Stuart. (1992). "Who needs identity", in Hall, S and Du Gay, P (eds), *Questions of Cultural Identity*. London: Sage
- Huntington, Samuel P. (1991). *Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, OK: University of Oklahoma Press: Norman Oklahoma.
- Istianda, Meita. (2011). Upaya Menjaga Integrasi Nasional. *Makalah Diskusi matakuliah Politik Lokal*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Linz, Juan J. and Alfred, Stephan. (1990). *The Breakdown of Democratic Regimes*. Baltimore-London: The John Hopkins University Press.
- Mangunwijaya, YB. (1986). *Realitas Pasca-Indonesia dan Pasca-Einstein*. Majalah Seni, ed-2.
- M. Goff, Patricia. (2000). *Invisible Borders: Economic Liberalization and National Identity*. Oxford: Blackwell Publishers.

Markoff, John. (1996). *Waves of Democracy, Social Movements, and Political Change*. Pine Forge Press.

Muhaimin, Yahya dan MacAndrews, Collin. (1988). *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Przeworski, Adam. (1988). "Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts." In J. Elster & Rune Slagstad, *Constitutionalism and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Huntington, Samuel. (1965). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.

Sen, Amartya. (2006). *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*. Jakarta: Marjin Kiri.

Sjamsuddin, Nazaruddin. (1989). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Sjamsuddin, Nazaruddin. (1994). *Integrasi dan Ketahanan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Lemhanas.

Internet:

Apa yang Terjadi. Diakses dari: <http://peduli-indonesia.blogspot.com/2007/07/apa-yang-terjadi-1998-3.html> pada tanggal 10 Desember 2015.

Dampak Globalisasi dalam Bidang Ekonomi. Diakses dari:

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/dampak-globalisasi-dalam-bidang-ekonomi-2/> pada tanggal 15 Desember 2015

Revolusi Mesir, Revolusi Social Media. Diakses dari:

<http://republiktwitter.wordpress.com/2011/02/01/revolusi-mesir-revolusi-social-media-2/> pada tanggal 15 Desember 2015